



MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGELOLA ASET PUBLIK DI DINAS BPKAD PROVINSI BANTEN

Endayani¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: endayani@binabangsa.ac.id

Abstrak

Pengelolaan aset publik merupakan fungsi strategis yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten bertanggung jawab atas pengelolaan aset pemerintah daerah yang membutuhkan pendekatan manajemen risiko untuk mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan aset publik di lingkungan BPKAD Banten serta mengevaluasi upaya mitigasi yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko dalam pengelolaan aset di BPKAD Banten meliputi risiko administrasi, risiko hukum, dan risiko kehilangan atau kerusakan aset. Upaya mitigasi yang telah dilakukan meliputi penyusunan kebijakan pengamanan aset, peningkatan pengawasan melalui sistem informasi, dan pelatihan bagi pegawai. Namun, tantangan dalam pelaksanaan manajemen risiko masih ditemukan, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis. Studi ini merekomendasikan perlunya peningkatan sumber daya manusia, pembaruan sistem informasi aset, serta penegakan kebijakan mitigasi risiko agar pengelolaan aset publik di BPKAD Banten lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Manajemen Risiko; Aset; Pemerintah*

Abstract

The management of public assets is a strategic function that affects the effectiveness of government services to the community. The Banten Provincial Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) is responsible for the management of local government assets which requires a risk management approach to reduce potential losses and increase accountability. This study aims to identify and analyze the main risks faced in the management of public assets within BPKAD Banten and evaluate the mitigation efforts implemented. The research method used is qualitative descriptive with data collection through interviews, document studies, and field observations. The results of the study show that risks in asset management at BPKAD Banten include administrative risk, legal risk, and risk of loss or damage to assets. Mitigation efforts that have been carried out include the preparation of asset security policies, increased supervision through information systems, and training for employees. However, challenges in the implementation of risk management are still found, especially related to limited resources and technical capacity. This study recommends the need to improve human resources, update asset information systems, and enforce risk mitigation policies so that the management of public assets in BPKAD Banten is more effective and sustainable.

Keywords: *Risk Management; Assets; Government*

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset publik merupakan salah satu komponen penting dalam administrasi pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Aset-aset yang dikelola oleh pemerintah daerah,

seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan fasilitas umum lainnya, memiliki nilai yang signifikan dan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat maksimal serta mengurangi risiko kerugian akibat ketidakmampuan dalam pengelolaannya (Bisma, 2022). Di Provinsi Banten, pengelolaan aset publik merupakan tanggung jawab Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang memiliki peran dalam memastikan bahwa aset daerah terinventarisasi, terpelihara, dan dimanfaatkan secara optimal serta akuntabel (Rosadi, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan aset publik dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko (Sipayung, 2022). Risiko tersebut meliputi risiko kehilangan atau kerusakan aset, risiko administrasi akibat data aset yang tidak akurat, serta risiko hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan aset. Tanpa adanya manajemen risiko yang efektif, pengelolaan aset publik berpotensi mengakibatkan kerugian finansial dan menurunkan akuntabilitas serta transparansi pemerintah daerah (Tamelab et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pengelolaan aset (Alfiani, 2022).

Dinas BPKAD Provinsi Banten telah berupaya menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan aset, namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan kebijakan (Regina, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di BPKAD Provinsi Banten, mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan (Darujati, 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk peningkatan tata kelola aset publik di Provinsi Banten, sekaligus mendukung terciptanya pengelolaan aset yang lebih efisien dan akuntabel.

Rumusan Masalah: 1. Apa saja risiko yang dihadapi dalam pengelolaan aset publik di Dinas BPKAD Provinsi Banten? 2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di BPKAD Banten? 3. Sejauh mana efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh Dinas BPKAD dalam pengelolaan aset publik? Tujuan Penelitian yakni Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di Dinas BPKAD Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan tata kelola aset publik yang lebih baik di Provinsi Banten (Fachreji, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Metode ini dipilih agar peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dihadapi dalam pengelolaan aset publik serta mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan oleh BPKAD (Devita, 2022). Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

Pendekatan Penelitian Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks, persepsi, dan implementasi manajemen risiko di BPKAD Provinsi Banten (Asmanu, 2020). Fokus penelitian ini adalah pada identifikasi risiko dan strategi mitigasi dalam pengelolaan aset publik, yang mencakup risiko finansial, risiko operasional, dan risiko hukum. **Subjek dan Lokasi Penelitian** Subjek penelitian ini adalah para pejabat dan pegawai yang berperan langsung dalam pengelolaan aset publik di BPKAD Provinsi Banten, seperti kepala bidang, staf pengelola aset, serta pihak-pihak yang terkait dalam proses manajemen risiko di instansi tersebut (Sundari, 2021). Lokasi penelitian dilakukan di kantor BPKAD Provinsi Banten.

Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan kunci di BPKAD yang memiliki peran dalam pengelolaan aset. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang jenis risiko yang dihadapi, strategi mitigasi yang diterapkan, dan kendala dalam penerapan manajemen risiko. **Observasi Partisipatif:** Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan aset di BPKAD untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik manajemen risiko. **Dokumentasi:** Pengumpulan dokumen yang relevan, seperti laporan inventaris aset, kebijakan internal, SOP (*Standard Operating Procedures*), serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, dilakukan untuk mendukung data dari hasil wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yang meliputi: **Reduksi Data:** Mengelompokkan data-data terkait jenis risiko, strategi mitigasi, dan kendala pengelolaan aset. **Kategorisasi Tema:** Mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang diperoleh, seperti jenis risiko, efektivitas mitigasi, dan permasalahan teknis dalam implementasi. **Penyajian Data:**

Menyusun temuan penelitian dalam bentuk narasi yang menjelaskan hasil analisis secara rinci. **Validasi Data** Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode,

yakni dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh. Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap Persiapan: Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah, menetapkan tujuan, dan merancang instrumen pengumpulan data. Tahap Pengumpulan Data: Melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai prosedur yang ditetapkan.

Tahap Analisis dan Interpretasi Data: Menganalisis data yang diperoleh dan menginterpretasikan hasilnya sesuai dengan fokus penelitian. Tahap Pelaporan: Menyusun laporan penelitian yang berisi temuan, analisis, serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di BPKAD Provinsi Banten. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan manajemen risiko di BPKAD Banten serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset publik di provinsi tersebut.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama dalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam tiga bagian: jenis risiko yang dihadapi dalam pengelolaan aset publik, strategi mitigasi yang diterapkan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi manajemen risiko di BPKAD Banten (Manafe, 2023).

1. Jenis Risiko dalam Pengelolaan Aset Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Banten menghadapi beberapa jenis risiko utama dalam pengelolaan aset publik, yaitu:

- **Risiko Administratif**

Risiko ini terjadi akibat adanya ketidakakuratan dalam pencatatan dan inventarisasi aset, yang dapat menyebabkan kesalahan data atau informasi tentang jumlah dan kondisi aset yang dimiliki. Ketiadaan data yang akurat dan terkini dapat mempersulit pemantauan dan pengelolaan aset yang efektif.

- **Risiko Kehilangan dan Kerusakan Aset**

BPKAD Banten menghadapi risiko kehilangan atau kerusakan aset, terutama pada aset bergerak seperti kendaraan dan peralatan elektronik. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemeliharaan aset, serta minimnya sistem pengamanan yang memadai.(Wulandari, 2017)

- Risiko Hukum dan Regulasi

Risiko ini berkaitan dengan potensi permasalahan hukum dalam hal kepemilikan aset yang belum memiliki dokumen sah atau adanya perbedaan dalam regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan daerah. Risiko ini dapat menghambat proses pemanfaatan aset atau bahkan mengakibatkan perselisihan hukum terkait kepemilikan aset.(Kusumawadani, 2018)

2.Strategi Mitigasi Risiko yang Diterapkan

BPKAD Banten telah menerapkan sejumlah strategi mitigasi untuk mengurangi dampak dari risiko-risiko yang dihadapi(Wijaya, 2023). Berikut adalah beberapa strategi mitigasi utama:

- Pembenahan Sistem Inventarisasi Aset

Upaya untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data aset dilakukan melalui sistem inventarisasi aset berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data aset yang lebih terintegrasi, sehingga memperkecil risiko administratif dan memungkinkan pemantauan kondisi aset secara lebih efektif.(Simbolon et al., 2023)

- Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan

Untuk mencegah risiko kehilangan dan kerusakan aset, BPKAD Banten telah menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama pada aset-aset bergerak. Selain itu, BPKAD juga meningkatkan frekuensi pemeliharaan dan inspeksi untuk menjaga kondisi aset.

- Penguatan Aspek Legalitas dan Dokumen Kepemilikan Aset

BPKAD Banten telah berupaya memperbaiki dokumen kepemilikan aset dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk memastikan semua aset memiliki dokumen sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah hukum di masa mendatang.

3. Tantangan dalam Implementasi Manajemen Risiko

Meskipun berbagai strategi mitigasi telah diterapkan, BPKAD Provinsi Banten masih menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan manajemen risiko, antara lain:(Niliani, 2019)

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

BPKAD mengalami keterbatasan dalam hal jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang berpengalaman dalam manajemen risiko aset. Keterbatasan ini menyebabkan proses pemantauan dan pengawasan aset menjadi kurang optimal, terutama dalam hal pemutakhiran data dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

- Infrastruktur Teknologi yang Belum Optimal
- Sistem informasi yang digunakan masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan data aset yang lebih akurat dan real-time. Infrastruktur teknologi yang terbatas ini menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan sistem manajemen aset yang terintegrasi dan efisien.
- Keterbatasan Anggaran

Pengelolaan aset publik membutuhkan anggaran yang memadai, terutama untuk pemeliharaan dan pembaruan aset. Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala dalam upaya pemeliharaan rutin dan pemutakhiran sistem yang lebih baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh BPKAD Banten sudah berjalan dengan berbagai upaya mitigasi, meskipun belum sepenuhnya optimal.(Zebua et al., 2022) Risiko administratif dan hukum, yang berkaitan dengan ketidakakuratan data dan legalitas aset, memerlukan perhatian khusus karena berdampak langsung pada keberlanjutan pengelolaan aset publik. Sementara itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menghambat upaya mitigasi risiko yang lebih komprehensif(Fajrina, 2022).

Penelitian ini sejalan dengan teori bahwa manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik memerlukan pendekatan holistik, yang mencakup dukungan teknis, sumber daya yang memadai, dan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dapat diatasi dengan pelatihan khusus dalam manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yang lebih canggih (Yulianti, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian mengenai manajemen risiko dalam pengelolaan aset publik di Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat upaya untuk mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko, masih ada sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Upaya manajemen risiko di BPKAD Banten telah dimulai dengan baik, namun perlu penguatan pada aspek

sumber daya, teknologi, dan kebijakan untuk memastikan pengelolaan aset publik yang lebih efektif dan akuntabel.

REFERENSI

- Alfiani, R. (2022). PENGELOLAAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA COVID-19. *Keuangan Publik*, 6(2), 81–95.
- Asmanu, S. (2020). Praktik Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota. *Of Islamic Accounting Tax*, 3(2), 115–130.
- Bisma, R. (2022). Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan. *Journal Information Engineering and Educational Technology*, 6(2), 73–79.
- Darujati, C. (2021). Penilaian Risiko Data Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan Aset Menggunakan ISO 27005. *Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Dan Aset Menggunakan ISO 27005*, 10(1), 215–230.
- Devita, M. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. *Of Social Resech*, 1(11), 144–149.
- Fachreji, I. (2021). INFORMATION TECHNOLOGY ASSET SECURITY RISK MANAGEMENT USING ISO 31000: 2018 DISKOMINFO KOTA SALATIGA. *Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8(2), 36–43.
- Fajrina, N. (2022). Pengungkapan Manajemen Risiko: Perusahaan. *Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(1), 124–133.
- Manafe, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Ilmu Manajemen Terapan*, 4(348–356).
- Regina, J. (2020). Pembuatan Dokumen Prosedur Keamanan Informasi Yang Mengacu Pada Cobit 5 dan ISO 27001:2013 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. *Keamanan Informasi, Standard Operating Procedure, Cobit 5, ISO 27001:2013, IT Governance*, 1(1).
- Rosadi, I. (2024). RESEARCH663INNOVATIVE. *A*, 1(2), 663–672.
- Sipayung, B. (2022). Manajemen risiko dalam pertimbangan pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(4), 681–691.
- Sundari, F. (2021). Manajemen Risiko PUSDATIN. *Sistem Informasi*, 12(1), 36–42.
- Tamelab, Y., Pala, A., Lassa, A., & Tiza, A. L. (2021). Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Dalam Pengelolaan Aset Dan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara

a. INNOVATIVE, 1(2), 663–673.

Wijaya, Y. (2023). Pelaksanaan Review Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 330–343.

Yulianti, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. *Ekonomic, Businnes Aand Accounting*, 7(1), 637–649.

Kusumawadani, P. (2018). Manajemen aset tanah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota serang. 1–211.

Niliani, D. (2019). Implementasi Manajemen Aset, Sumber Daya Manusia Pengelola Aset, Serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 102–113. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.5650>

Simbolon, T. R., Hukom, A., Adila, F., Sutrisno, I., Lesdiana, A., Fransiska, N., & Priskila, E. (2023).

Desember 2023 (15)2:345-353 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (Diterima 30-10-2023. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2023(1), 345–353. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>

Wulandari, F. (2017). Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Kabupaten Tangerang. April, 43–58.

Zebua, D. T. S., Manaroinson, J., & Moroki, F. (2022). Analisis Realisasi Anggaran Rutin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1–10. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.1743>